

HUTAN DAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN

Bunga Rampai Kegiatan - Kegiatan DKN



**DEWAN KEHUTANAN NASIONAL
PERIODE 2016 – 2021**



PT. ADLER MANURUNG PRESS

Komplek Mitra Matraman A1 / 17
Jl. Matraman Raya No. 148
Jakarta Timur 13130
Telp (+6221) 85918040
Fax (+6221) 85918041

ISBN 978-623-440-003-8



9 786234 400038



PT. ADLER MANURUNG PRESS

HUTAN DAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN

Bunga Rampai
Kegiatan-kegiatan

Dewan Kehutanan Nasional
Periode 2016 – 2021



Pengarah:

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM, IPU.

Editor:

Prof. Dr. Ir. John FoEh, IPU, CIQnR, CIQaR, CIGS, CIERM

Dr. Ir. Apik Karyana, M.Sc

Ir. Djati Witjaksono Hadi, M.Sc

Sekretariat:

Khulfi M. Khalwani, S.Hut., M.Si

Atjep Bolon, S.Si

KATA PENGANTAR

Buku *Hutan dan Pembangunan Kehutanan : Bunga Rampai Kegiatan Dewan Kehutanan Nasional Periode 2016 – 2021* disusun dalam rangka pelaksanaan Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) VII, yang merupakan kumpulan dari berbagai catatan kegiatan Dewan Kehutanan Nasional (DKN) selama periode kepengurusannya, mulai dari Rakernas Tahunan, Semiloka dan berbagai kegiatan diskusi lainnya dalam rangka menyambut KKI VII yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2022 di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta.

Bahan-bahan atau tulisan yang ada di dalam buku ini merupakan kumpulan dari berbagai makalah dan laporan kegiatan yang dimulai dari Kata Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penutupan KKI VI yang dilanjutkan dengan beberapa tulisan terkait masalah Perhutanan Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka membangun hutan tanaman serta beberapa kegiatan terkait *Corporate Social Responsibility Korindo Group*, serta beberapa catatan / notulensi terkait FGD dalam kaitan dengan pelaksanaan sosialisasi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Bagian pertama menguraikan laporan kegiatan DKN 2017-2018 serta notulensi dan beberapa dokumentasi kegiatan. Bagian kedua merupakan kumpulan makalah dan hasil diskusi Semiloka Nasional Bisnis Kehutanan Indonesia dengan topik “Penguatan Kepastian Usaha, Revitalisasi Bisnis Kehutanan dan Optimalisasi Rantai Nilai”. Topik-topik menarik dalam semiloka ini antara lain; Kepastian Usaha Kehutanan Ditinjau dari Berbagai Aspek, Revitalisasi Bisnis Kehutanan Mulai dari Hulu Yang Meliputi Industri Kayu Primer, Sekunder dan Tersier, Optimalisasi Rantai Nilai Produk Kehutanan, serta Sinkronisasi Peran Kementerian LHK dan Badan Restorasi Gambut dalam Mendukung Bisnis Kehutanan. Pemakalah dan diskusi melibatkan berbagai pihak dari Perguruan Tinggi, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi KLHK, Badan Restorasi Gambut Nasional, Kementerian Perdagangan, Perindustrian serta APHI / APKINDO dan dilengkapi dengan notulensi dan dokumentasi kegiatan.

Selanjutnya bagian ketiga meliputi kegiatan yang berkaitan dengan Penyusunan Voluntary National Contributions (VNC) to UNFF yang meliputi Pra Semiloka / Sosialisasi Penyusunan VNC, Semiloka Penyusunan VNC to UNFF, termasuk VNCs-Indonesia-Draft final. Topik-topik penting yang dikaji meliputi; Sambutan Menteri LHK, Selayang Pandang United Nations Strategic Plan for Forests (UNSPF) 2017-2030 dan Penyusunan Naskah VNC Nasional, UN-Strategic Plan On Forests: Voluntary National Reporting, Perhutanan Sosial, VNC-UNFF Indonesia, Menjaga Hutan Merawat Peradaban, Fasilitas Dana Bergulir Sebagai Sumber Pembiayaan Usaha Kehutanan Dalam Rangka Mendukung Pengelolaan Hutan Lestari, Voluntary

National Contribution (VNC): Global forest goal 5 and associated targets, Goal 6 : Meningkatkan kerjasama, koordinasi, koherensi dan sinergi terhadap isu-isu yang terkait dengan hutan di semua tingkat, termasuk di dalam Sistem PBB dan seluruh organisasi. Bagian ini termasuk VNCs-Indonesia-Draft final serta notulensi dan dokumentasi kegiatan.

Bagian keempat buku ini berisi tentang RAKERNAS Dewan Kehutanan Nasional tanggal 2-3 Oktober 2018 yang di dalamnya dibahas berbagai hal meliputi; Pendanaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Terrestrial, Penguatan KPH Dalam Mendukung Perhutanan Sosial, Penguatan Lembaga Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk Mendorong Perhutanan Sosial di Provinsi NTB, Penguatan KPH dan Perhutanan Sosial, Penguatan KPH (Lindung), Pendanaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Terrestrial, serta tambahan materi tentang Mungkinkah Sebagian Hutan Indonesia Dikelola Swasta? Bagian ini juga dilengkapi dengan notulensi dan dokumentasi kegiatan.

Bagian kelima buku berisi tentang Kegiatan Perhutanan Sosial dan Hutan Adat yang membahas 2 hal pokok yakni; *Final Report "Developing Environmental Education Program for the Mangrove Forest Based-Ecotourism in Juru Seberang Community Forest in Belitung"* dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) : Kebijakan, Implementasi dan Masa Depan. Selanjutnya bagian keenam buku ini memuat Semiloka Bisnis Kehutanan dan RAKERNAS Dewan Kehutanan Nasional tanggal 30-31 Januari 2020. Isi bagian keenam antara lain meliputi; Semiloka Bisnis Kehutanan " Penguatan Penguatan sub sektor kehutanan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan hidup & kesejahteraan masyarakat: Rekomendasi untuk pembaruan tata kelola kehutanan dan penataan SDM di KLHK", Kapasitas Perubahan Tata Kelola Kehutanan, Penguatan Kelembagaan Dan Organisasi KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), Restrukturisasi SDM Kehutanan Ke Tingkat KPH dan Revisi UU Nomor 41 Tahun 1999, Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial, Peluang Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Produksi Pada Areal Kerja IUPHHK, Program Setapak – Selamatkan Hutan Dan Lahan Melalui Perbaikan Tata Kelola Di Indonesia, Penguatan Sub Sektor Kehutanan Untuk Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat, Revitalisasi Industri Kehutanan, Revitalisasi Industri Kehutanan Dan Refungsionalisasi Pembangunan HTI Bagi Pengembangan Devisa Negara serta Summary Semiloka dan RAKERNAS dan Prosiding Semiloka dan RAKERNAS 2020.

Bagian terakhir atau ketujuh buku ini berisi Lokakarya Virtual "Potensi Integrasi Hutan Adat ke dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)" tanggal 14 Juli 2020 yang meliputi Kerangka Acuan Lokakarya Virtual Tingkat Nasional dan Kertas Konsep "Potensi Integrasi Hutan Adat ke dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)" disertai notulensi dan dokumentasi kegiatan.

Jakarta, November 2021

Editor

Prof. Dr. Ir. John FoEh, IPU, CIQnR, CIQaR, CIGS, CIERM

Dr. Ir. Apik Karyana, M.Sc

Ir. Djati Witjaksono Hadi, M.Sc

Sekretariat :

Khulfi M. Khalwani, S.Hut., M.Si

Atjep Bolon, S.Si

Sambutan Ketua Umum Presidium Dewan Kehutanan Nasional pada Buku Bunga Rampai Dewan Kehutanan Nasional

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,

Yth.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK);
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK);
Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian LHK;
Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Kementerian LHK;
Anggota Presidium Dewan Kehutanan Nasional (DKN);
Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan (APHI);
Dekan Fakultas Kehutanan/ Ketua Program Kehutanan di seluruh Indonesia;
Pimpinan kelompok masyarakat;
Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat bidang Kehutanan;
Seluruh rimbawan dimanapun berada;

Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa menyelesaikan penyusunan buku Hutan dan Pembangunan Kehutanan: *Bunga Rampai Kegiatan Dewan Kehutanan Nasional Periode 2016-2021* sebelum Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) VII.

Saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tim Penyusun yang dalam masa Pandemi Covid-19, masih dapat melakukan penyusunan buku ini yang merupakan kumpulan dari berbagai catatan kegiatan mulai dari Rapat Kerja Nasional, Semiloka dan berbagai kegiatan diskusi dalam rangka menyambut Kongres Kehutanan Indonesia VII.

Dewan Kehutanan Kehutanan (DKN) dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 48/ Menlhk/ Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DKN bertugas membantu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi kinerja serta merevisi kebijakan di bidang kehutanan. Sesuai dengan tugas tersebut dan dalam rangka melaksanakan prinsip *check and balances* dalam pembangunan kehutanan di Indonesia, maka DKN akan melaksanakan

kegiatan konsultatif dan koordinatif dalam bentuk Kongres Kehutanan Indonesia (KKI). Kongres ini merupakan respon DKN terhadap progres pembangunan bidang Kehutanan yang terus menunjukkan tren positif dan akseleratif, sehingga harus diantisipasi dan dipersiapkan dalam rangka menyiapkan generasi masa depan bangsa Indonesia yang tangguh dan handal.

Susunan Presidium Dewan Kehutanan Nasional terakhir ditetapkan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (d/h. Menteri Kehutanan) dan yang terakhir ditetapkan dengan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.414/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2020 tanggal 3 Nopember 2020.

Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) pertama kali dilaksanakan pada tanggal 21-28 Januari 1956 di tengah gejolak politik pasca Pemilu 1955, yang dilaksanakan dan membahas: Industri kehutanan, fungsi produksi dan pelindung hutan; Silvikultur serta Organisasi Jawatan Kehutanan. Selanjutnya KKI II dilaksanakan pada tanggal 22-25 Oktober 1990, setelah vakum selama 34 tahun setelah KKI pertama yang dilaksanakan dengan semakin meningkatnya dukungan politik terhadap keberadaan hutan, khususnya hutan tropis, dengan keragaman fungsinya.

KKI III dilaksanakan pada tanggal 25-28 Oktober 2002, ditandai dengan kekhawatiran kerusakan hutan pasca reformasi dimana laju deforestasi. KKI IV dilaksanakan pada tanggal 19-21 Desember 2006, dengan melahirkan Dewan Kehutanan Nasional (DKN) yang dibentuk sebagai wujud partisipasi publik yang semakin meningkat untuk turut serta dalam pengelolaan kehutanan. DKN disepakati sebagai *constituent-based organization* (CBO);

KKI V dilaksanakan pada tanggal 22-24 November 2011, ditandai dengan semakin detilnya isu kehutanan yang dibahas di antaranya dengan disepakatinya GBHK 2011-2016 serta fokus reformasi kehutanan ke depan serta pembagian peran para pihak dalam mendukung pembangunan kehutanan, dan KKI VI dilaksanakan pada tanggal 29 November 2 Desember 2016 diawali dengan pra-kongres di 6 regional yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku-Papua dengan isu utama tentang KPH, Gernas SDA, karhutla, restorasi ekosistem, resolusi konflik, Masyarakat Hukum Adat dan REDD+;

Selanjutnya setiap lima tahun sekali DKN melakukan Kongres Kehutanan Indonesia (KKI), dimana dalam KKI dilakukan pembahasan topik dan isu aktual di bidang kehutanan, evaluasi pelaksanaan kegiatan DKN dan pemilihan Presidium DKN yang terdiri dari lima

Kamar, yaitu: Kamar Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Masyarakat.

Pada KKI VII yang telah didahului dengan Pra-KKI di tujuh Regional, diharapkan dapat diperoleh saran dan rekomendasi pembangunan hutan dan kehutanan ke depan, sehingga aspirasi dari seluruh Indonesia dapat tersaring dan dapat melingkupi program-program dan kegiatan di kementerian LHK.

Besar harapan kami bahwa pada tahun 2021 dan tahun-tahun seterusnya, kita tetap selalu dapat mencatatkan kemajuan dan pencapaian yang lebih baik demi kemaslahatan rakyat dan kehidupan di planet bumi yg lebih berkelanjutan. Berdasarkan refleksi kegiatan bidang Kehutanan tahun 2021 dan langkah-langkah korektif yang semakin berpihak pada masyarakat, yang dapat dilihat dari meningkatnya proporsi luas kawasan hutan yang dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat serta pola kerja dan pendekatan, internalisasi dimensi lingkungan pembangunan LHK untuk pembangunan nasional, melalui Pola Perencanaan Ruang dan Perencanaan Pembangunan yang mengintegrasikan ecoregion, inventarisasi Lingkungan Hidup, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, seperti pada kebijakan pembangunan *Food Estate* dengan program pengembangan wilayah terpadu ramah lingkungan, serta penguatan lembaga masyarakat.

Kebijakan usaha kehutanan dengan melakukan integrasi hulu-hilir sejalan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan peraturan Menteri LHK sebagai peraturan pelaksanaannya dapat peningkatan produktivitas hutan produksi, penyederhanaan regulasi untuk investasi, sinkronisasi pusat- daerah terkait pengelolaan hutan, peningkatan daya saing industri dan ekspor, multiusaha kehutanan dan diversifikasi produk hasil hutan, diharapkan dapat meningkatkan manfaat hutan bagi masyarakat luas.

Sekali lagi , kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun dan seluruh jajaran Presidium Dewan Kehutanan Nasional yang telah bekerja dengan baik dan tidak kenal lelah dengan segala keterbatasan yang ada.

Semoga Allah SWT selalu merestui langkah dan upaya kita.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa barokatuh.

Ketua Umum Presidium Dewan Kehutanan Nasional,

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM.

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Pada Buku Bunga Rampai Dewan Kehutanan Nasional

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,

Yth.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK);
Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian LHK;
Ketua Umum Presidium Dewan Kehutanan Nasional (DKN);
Anggota Presidium Dewan Kehutanan Nasional (DKN);
Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan (APHI);
Dekan Fakultas Kehutanan/ Ketua Program Kehutanan di seluruh Indonesia;
Pimpinan kelompok masyarakat;
Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat bidang Kehutanan;
Seluruh rimbawan dimanapun berada;

Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada Dewan Kehutanan Nasional (DKN) yang telah menyelesaikan penyusunan Buku Bunga Rampai Kegiatan Dewan Kehutanan Nasional Periode 2016-2021, yang merupakan kumpulan dari berbagai catatan kegiatan mulai dari Rapar Kerja Nasional, Semiloka dan berbagai kegiatan diskusi dalam rangka menyambut Kongres Kehutanan Indonesia VII.

Sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 48 Tahun 2016 tentang Dewan Kehutanan Nasional (DKN), tugas DKN adalah membantu tugas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi kinerja serta kebijakan di bidang kehutanan. Sesuai dengan tugas DKN tersebut diatas, dalam rangka melaksanakan prinsip *check and balances* dalam pembangunan kehutanan, maka DKN melaksanakan kegiatan konsultatif dan koordinatif dalam bentuk Kongres Kehutanan Indonesia (KKI).

Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) merupakan respons DKN terhadap progres pembangunan kehutanan yang terus menunjukkan bidang kehutanan yang terus menunjukkan tren positif dan akseleratif, sehingga harus diantisipasi dan disiapkan dalam rangka menyiapkan tantangan pembangunan kehutanan ke depan, serta bangsa Indonesia yang tangguh dan handal.

Beberapa saat lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 dan segera memasuki tahun 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita masih memiliki kekuatan dalam menjalankan tugas, juga menjalani kehidupan atas rahmat dan karuniaNYA, ditengah situasi sulit karena Pandemi-COVID-19. Bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, serta panduan bernegara dan berpemerintahan serta bermasyarakat yang tertuang didalam konsitusi serta arahan, kebijakan, dan keteladanan kerja para Pimpinan telah mendorong kita dengan langkah-langkah saat ini yang sangat jelas memberikan optimisme dan harapan.

Dari peristiwa pandemi COVID-19 dan peristiwa-peristiwa yang berasosiasi dengan persoalan pandemi tersebut, kita belajar banyak. Sebagaimana Yth Bapak Presiden katakan untuk kita melakukan perubahan cara berpikir dan cara bertindak, penyesuaian dan pindah panjang gelombang serta kecepatan kerja yang luar biasa untuk kita bisa mengatasi situasi dengan sebaik-baiknya. Aktualisasi berbagai pihak dan terutama masyarakat juga mengalami perubahan dan pengembangan berbagai inovasi, terutama yang melibatkan teknologi informasi. Kita betul-betul berada di era-5G dan menuju 6-G, Kita jangan luput dari pembelajaran ini dari aspek konsitusionalitas. Secara prinsip konstitusi bertujuan untuk memantapkan nilai-nilai suatu bangsa serta memantapkan sasaran nasional yang ingin dicapai. Disamping tujuan yang lain yaitu memberdayakan negara, mempersiapkan stabilitas pemerintahan, melindungi kebebasan serta memberikan legitimasi pemerintahan. Konstitusi juga berfungsi untuk penataan nasional, penataan hubungan nasional dan sub nasional (dalam strata pemerintahan maupun dalam penataan state dan non-state actors), menjamin kebebasan serta menjaga keberlangsungan eksistensi negara.

Pelajaran berharga yang paling nyata bisa kita lihat dalam masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini ialah kita bersama terus melakukan pemantapan nilai-nilai bangsa yang kita miliki yaitu gotong royong, participatory. Kita juga terus berupaya memperkuat sasaran nasional, yaitu mensejahterakan masyarakat. Di sepanjang waktu rapat-rapat kabinet maupun arahan di lapangan, sangat jelas dari Yth Bapak Presiden untuk percepatan, gerak cepat, untuk bentuk nyata kegiatan pembangunan bagi rakyat, dan bermanfaat langsung bagi rakyat. Prinsip-prinsip dan arahan itu mendorong seluruh jajaran dan perangkat aspek lingkungan hidup dan kehutanan bersama-sama masyarakat terus berusaha untuk bekerja dan berbuat nyata. Dalam Buku SOIFO 2000 merangkum dengan se-baik dan se-sistimatis mungkin corrective measures kebijakan kehutanan Indonesia, yang bisa dilihat saat kita dalam buku tersebut bahwa terdapat "pemantapan nilai nilai" serta pemantapan sasaran nasional, di bidang kehutanan dan lingkungan sebagaimana panduan dalam konstitusi negara. Sebagaimana buku SOIFO 2018 dan telah mendapat sambutan positif masyarakat internasional, saya berharap buku ini juga dapat menjadi referensi utama perkembangan dan kemajuan tentang status kehutanan di tanah air, sekaligus menjelaskan berbagai tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah demi memenuhi amanat konstitusi, sekaligus juga menuju pencapaian SDG sejalan dengan harapan masyarakat global.

Dengan akan dilaksanakannya KKI pada tahun 2022 yang telah didahului dengan Pra Kongres Kehutanan Indonesia VII di tujuh Regional, diharapkan masukan dan koreksi terhadap kegiatan kehutanan dapat diperoleh dan dirumuskan pada KKI VII yang direncanakan pada bulan Januari 2022.

Besar harapan kita bersama, agar tahun 2021 dan tahun-tahun seterusnya, kita tetap selalu dapat mencatatkan kemajuan dan pencapaian yang lebih baik demi kemaslahatan rakyat dan kehidupan di planet bumi yg lebih berkelanjutan. Berdasarkan refleksi kegiatan bidang Kehutanan tahun 2020 dan 2021 kegiatan kehutanan telah memantapkan nilai-nilai dan prinsip penyelenggaraan kehutanan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, antara lain beraktualisasi dalam menegaskan pertautan keseimbangan ekonomi-ekologi- sosial untuk pembangunan nasional. Pada konsep landscape ecology secara teoritis ini dapat digambarkan seperti tentang faktor-faktor pembentuk bentang alam atau landscape termasuk faktor manusia, dan rentang waktu, Internalisasi dengan sasaran pemulihan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan terjaga dengan menggunakan prinsip kepastian Kawasan, kepastian hukum, dan kepastian usaha, melalui instrumen kebijakan pembangunan nasional, environmental assessment, public engagement and participation, perizinan dan pengawasan law enforcement.

Langkah korektif yang semakin berpihak pada masyarakat, yang dapat dilihat dari meningkatnya proporsi luas Kawasan hutan yang dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat dari periode 2015 (4,14%) meningkat pada tahun 2020 (18,4%) dan diharapkan tahun 2024 menjadi 30,4%. Perhutanan sosial menjadi *prime mover* dalam implementasi kebijakan alokasi yang berpihak pada rakyat. Pola kerja dan pendekatan, internalisasi dimensi lingkungan pembangunan LHK untuk pembangunan nasional, melalui Pola Perencanaan Ruang dan Perencanaan Pembangunan yang mengintegrasikan ecoregion, inventarisasi Lingkungan Hidup, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Seperti misalnya pada kebijakan pembangunan Food Estate dengan program pengembangan wilayah terpadu ramah lingkungan, pola agroforestry, sylvofishery, silvopasture, penguatan Lembaga masyarakat, redistribusi tanah, pemberdayaan dan integrasi masyarakat, teknologi dan investasi.

Kebijakan usaha kehutanan dengan melakukan integrasi hulu-hilir, peningkatan produktivitas hutan produksi, penyederhanaan regulasi untuk investasi, sinkronisasi pusat- daerah terkait pengelolaan hutan, peningkatan daya saing industri dan ekspor, multiusaha kehutanan dan diversifikasi produk hasil hutan, diharapkan dapat meningkatkan manfaat hutan bagi masyarakat luas.

Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua Presidium dan seluruh Anggota Presidium Dewan Kehutanan Nasional yang telah bekerja dengan baik dan agar dilanjutkan dengan langkah-langkah baik dan dalam prinsip mutual respect, membangun energi positif, karena kita sedang dalam periode kerja keras dan membutuhkan bukti lapangan.

Semoga Tuhan merestui langkah kita.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa barokatuh.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Dr. Ir. Siti Nurbaya, MSc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

SAMBUTAN

1. Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

DAFTAR ISI

- I. RAKERNAS Dewan Kehutanan Nasional 4-5 Mei 2017
 - 1.1 Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 1.2 Aturan Dan Kebijakan Dalam Mekanisme Perhutanan Sosial Untuk Target 12,7 Juta Ha (Ir. Wiratno, MSc – Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, KLHK)
 - 1.3 FGD Kedua Penyusunan RapermenLHK Tentang Pelayanan Informasi Publik (Christian Purba – FWI)
 - 1.4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Membangun Hutan Tanaman – *Corporate Social Responsibility/CSR* (Dr. Ir. Endro Siswoko, MM – Direktur Utama PT. INHUTANI V)
 - 1.5 Selamat Datang di Korindo Papua Kab. Boven Digoel dan Merauke (Satuman – *Legal & Corporate Social Responsibility* KORINDO Group)
 - 1.6 Laporan Kegiatan DKN 2017-2018
 - 1.7 Notulensi
 - 1.8 Dokumentasi Kegiatan
- II. Semiloka Nasional Bisnis Kehutanan Indonesia “Penguatan Kepastian Usaha, Revitalisasi Bisnis Kehutanan Dan Optimalisasi Rantai Nilai “ 8 Februari 2018
 - 2.1 Sambutan Pembukaan
 - 2.2 Kepastian Usaha Kehutanan Ditinjau dari Berbagai Aspek
 - 2.2.1 Badan Litbang dan Inovasi – KLHK
 - 2.2.2 Iman Santoso – APhi
 - 2.2.3 Prof. Dr. Ir. Dudung Darusman, IPU – IPB
 - 2.3 Revitalisasi Bisnis Kehutanan Mulai dari Hulu; Yang Meliputi Industri Kayu Primer, Sekunder dan Tersier
 - 2.3.1 Putera Parthama – Dirjen PHPL KLHK
 - 2.3.2 Dr. Bambang Widiantoro – APhi
 - 2.4 Optimalisasi Rantai Nilai Produk Kehutanan
 - 2.4.1 Ditjen Perdagangan Luar Negeri – Kementerian Perdagangan RI
 - 2.4.2 Dr. David, SE, MM – APhi / DKN

- 2.4.3 Dr. Ir. Sofyan P. Warsito, MSc - UGM
- 2.5 Sinkronisasi Peran Kementerian LHK dan Badan Restorasi Gambut dalam Mendukung Bisnis Kehutanan
 - 2.5.1 Dr. Nurul Qomar, S.Hut, MP – UNRI
 - 2.5.2 Ditjen KSDAE – KLHK
 - 2.5.3 Badan Restorasi Gambut
 - 2.5.4 *Supply Chain Management Model: Pengembangan Hutan Produksi Yang Menjamin Masa Depan Industri Kehutanan di Indonesia* (John EHJ. FoEh)
- 2.6 Notulensi
- 2.7 Dokumentasi Kegiatan
- 2.8 Cerita dari Tapak : Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA)

III. Penyusunan Voluntary National Contributions (VNC) to UNFF

- 3.1 Pra Semiloka / Sosialisasi Penyusunan VNC 3 November 2017
 - 3.1.1 Selayang Pandang
 - 3.1.2 Notulensi
- 3.2 Semiloka Penyusunan VNC to UNFF 29 Maret 2018
 - 3.2.1 Sambutan Menteri LHK
 - 3.2.2 Selayang Pandang United Nations Strategic Plan for Forests (UNSPF) 2017-2030 dan Penyusunan Naskah VNC Nasional (Dr. Ir. Agus Justianto, MSc – Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK)
 - 3.2.3 UN-Strategic Plan On Forests: Voluntary National Reporting (Prof. Dr. Ir. Didik Suharjito, MS – Ketua Presidium DKN 2016-2017)
 - 3.2.4 Perhutanan Sosial (Dr. Ir. Bambang Supriyanto M.Sc – Dirjen PSKL KLHK)
 - 3.2.5 VNC-UNFF Indonesia (Ditjen PKTL KLHK)
 - 3.2.6 Menjaga Hutan Merawat Peradaban (Ir. Wiratno, M.Sc – Dirjen KSDAE KLHK)
 - 3.2.7 Fasilitas Dana Bergulir Sebagai Sumber Pembiayaan Usaha Kehutanan Dalam Rangka Mendukung Pengelolaan Hutan Lestari (BLU Pusat P2H KLHK)
 - 3.2.8 Voluntary National Contribution (VNC): Global forest goal 5 and associated targets (Ditjen PHPL KLHK)
 - 3.2.9 Goal 6 : Meningkatkan Kerjasama, Koordinasi, Koherensi dan Sinergi terhadap Isu-Isu yang Terkait dengan Hutan di Semua Tingkat, termasuk di dalam Sistem PBB dan Seluruh Organisasi (Dr. Ir. Agus Justianto, MSc – Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK)
 - 3.2.10 VNCs-Indonesia-Draft final
 - 3.2.11 Notulensi
 - 3.2.12 Dokumentasi Kegiatan

IV. RAKERNAS Dewan Kehutanan Nasional 2-3 Oktober 2018

- 4.1 Pendanaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Terrestrial (Ir. Wiratno, M.Sc – Dirjen KSDAE KLHK)

- 4.2 Penguatan KPH dalam Mendukung Perhutanan Sosial (Dr. Ir. Apik Karyana, M.Sc- Sekditjen PSKL KLHK)
- 4.3 Penguatan Lembaga KPH untuk Mendorong Perhutanan Sosial di Provinsi NTB (Samsudin – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB)
- 4.4 Penguatan KPH dan Perhutanan Sosial (Dr. Hilman Nugroho – Dirjen PHPL KLHK)
- 4.5 Penguatan KPH (L) (Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung PDASHL KLHK)
- 4.6 Pendanaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Terrestrial (Indra Gunawan – Direktur Keuangan dan Administrasi KEHATI)
- 4.7. Mungkinkah Sebagian Hutan Indonesia Dikelola Swasta? (John EHJ. FoEh)
- 4.8 Dokumentasi Kegiatan

V. Kegiatan Perhutanan Sosial dan Hutan Adat

- 5.1 Final Report “Developing Environmental Education Program for the Mangrove Forest Based-Ecotourism in Juru Seberang Community Forest in Belitung” (DKN)
- 5.2 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) : Kebijakan, Implementasi dan Masa Depan (Didik Suharjito, DKN – MFP3)

VI. Semiloka Bisnis Kehutanan dan RAKERNAS Dewan Kehutanan Nasional 30-31 Januari 2020

- 6.1 Semiloka Bisnis Kehutanan “ Penguatan Sub Sektor kehutanan untuk Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat: Rekomendasi untuk Pembaruan Tata Kelola Kehutanan dan Penataan SDM di KLHK”
 - 6.1.1 Kapasitas Perubahan Tata Kelola Kehutanan – Ir. Soetrisno, MM - Badan Kejuruan Teknik Kehutanan - Persatuan Insinyur Indonesia (Sesi 1)
 - 6.1.2 Penguatan Kelembagaan Dan Organisasi KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) – Ir. Sulton Setya G. Nanggara, Dir. Eksekutif Forest Watch Indonesia (Sesi 1)
 - 6.1.3 Restrukturisasi SDM Kehutanan ke Tingkat KPH dan Revisi UU No. 41/1999 – Prof. Dr. Ir. Agustinus Kastanya, DKN – Universitas Pattimura (Sesi 1)
 - 6.1.4 Notulensi Sesi 1 Hari Pertama 30 Januari 2020
 - 6.1.5 Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial- Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc - Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Sesi 2)
 - 6.1.6 Peluang Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Produksi pada Areal Kerja IUPHHK – Tjipta Purwita – APHI (Sesi 2)
 - 6.1.7 Program Setapak – Selamatkan Hutan dan Lahan Melalui Perbaikan Tata Kelola di Indonesia – Alam Surya Putra – TAF (Sesi 2)

- 6.1.8 Penguatan Sub Sektor Kehutanan untuk Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat- Idi Bantara – BPDASHL Way Seputih Way Sekampung (Sesi 2)
- 6.1.9 Pentingnya Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat – Jasardi Gunawan – AMAN (Sesi 3)
- 6.1.10 Notulensi Sesi 2 Hari Pertama 30 Januari 2020
- 6.1.11 Revitalisasi Industri Kehutanan - Soewarni - ISWA (Sesi3)
- 6.1.12 Revitalisasi Industri Kehutanan dan Refungsionalisasi Pembangunan HTI Bagi Pengembangan Devisa Negara, Bambang Soepijanto – APKINDO (Sesi 3)
- 6.1.13 Notulensi Sesi 3 Hari Pertama 30 Januari 2020

6.2 RAKERNAS DKN 2020

- 6.2.1 Hasil Pembahasan Program Kamar
- 6.2.2 Notulensi Rakernas

- 6.3 Summary Semiloka dan RAKERNAS
- 6.4 Prosiding Semiloka dan RAKERNAS
- 6.5 Dokumentasi Kegiatan

VII. Lokakarya Virtual “Potensi Integrasi Hutan Adat ke dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)” 14 Juli 2020

- 7.1 Kerangka Acuan Lokakarya Virtual Tingkat Nasional
- 7.2 Kertas Konsep “Potensi Integrasi Hutan Adat ke dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)”

VIII. Penutup dan Rekomendasi untuk Kegiatan Lanjutan